

## ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Tri Puji Yulianti<sup>1</sup>, Sonia Hafiza Putri<sup>2</sup>, Amalina Wahyuni Putri<sup>3</sup>,  
Fadhli Pramudya<sup>4</sup>, Budi Ardianto<sup>5</sup>  
Universitas Jambi

E-mail: [Tripujij16@gmail.com](mailto:Tripujij16@gmail.com) [Soniahafizaputri@gmail.com](mailto:Soniahafizaputri@gmail.com)  
[amalinawahyunip@gmail.com](mailto:amalinawahyunip@gmail.com) [fadliframudia2003@gmail.com](mailto:fadliframudia2003@gmail.com)

### Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip dasar yang memungkinkan setiap individu untuk memiliki hak yang tidak dapat diambil atau diabaikan oleh pemerintah atau orang lain. Dalam konteks hukum internasional, HAM memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak dapat diabaikan oleh pemerintah atau orang lain. Dalam analisis ini, kita akan memfokuskan pada implementasi HAM dalam hukum internasional, serta bagaimana negara-negara dan organisasi internasional seperti PBB berperan dalam melindungi dan memajukan. Tujuan Hak Asasi Manusia tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai sikap konkrit untuk menghormati orang lain, saling menghargai, dan memanusiakan manusia. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang terintegrasi dengan analisis literatur dan praktisi di bidang hukum. Metode ini dipilih karena memungkinkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai kompleksitas implementasi hukum internasional terkait dengan hak asasi manusia (HAM) dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam penelitian ini, analisis literatur akan dilakukan terhadap sumber-sumber yang relevan, termasuk artikel-artikel, buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan hukum internasional dan implementasinya terkait dengan HAM. Analisis ini akan membantu dalam memahami tantangan dan hambatan yang terkait dengan implementasi HAM dalam hukum internasional, serta bagaimana mereka dapat diatasi untuk meningkatkan keberhasilan implementasi HAM dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap kemanusiaan.

**Kata kunci:** Implementasi, Hukum Internasional, Ham

### Abstract

*Human Rights (HAM) are basic principles that allow every individual to have rights that cannot be taken away or ignored by the government or other people. In the context of international law, human rights have an important role in ensuring that everyone has the same rights and cannot be ignored by the government or other people. In this analysis, we will focus on the implementation of human rights in international law, as well as how countries and international organizations such as the UN play a role in protecting and promoting them. The aim of Human Rights is none other than a concrete attitude to respect other people, respect each other, and humanize humans. This research will use qualitative methods integrated with analysis of literature and practitioners in the legal field. This method was chosen because it allows to gain deeper insight into the complexity of implementing international law related to human rights (HAM) in preventing and dealing with crimes against humanity. In this research, literature analysis will be carried out on relevant sources, including articles, books and official documents related to international law and its implementation related to human rights. This analysis will help in understanding the challenges and obstacles associated with the implementation of human rights in international law, as well as how they can be overcome to increase the success of human rights implementation in preventing and addressing crimes against humanity.*

**Keyword:** implementation, international law, human rights,

## Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip dasar yang memungkinkan setiap individu untuk memiliki hak yang tidak dapat diambil atau diabaikan oleh pemerintah atau orang lain. Dalam konteks hukum internasional, HAM memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan tidak dapat diabaikan oleh pemerintah atau orang lain. Dalam analisis ini, kita akan memfokuskan pada implementasi HAM dalam hukum internasional, serta bagaimana negara-negara dan organisasi internasional seperti PBB berperan dalam melindungi dan memajukan HAM.

Implementasi HAM dalam hukum internasional memiliki beberapa aspek yang penting. Pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948 menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Kedua, Pasal 17 UDHR menegaskan bahwa hak milik seseorang tidak dapat diambil semena-mena. Ketiga, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G menyatakan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Tujuan Hak Asasi Manusia tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai sikap konkrit untuk menghormati orang lain, saling menghargai, dan memanusiakan manusia. Hak Asasi Manusia secara fundamental adalah hak untuk hidup, hak kebebasan dengan segala batasannya, hak untuk memiliki properti pribadi. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28G Ayat 1 juga mengatur bagi setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dari segi perlindungan pribadi maupun keluarganya dan perlindungan terhadap harta benda yang dimilikinya. Khusus mengenai pengaturan HAM, dapat dilihat pada Perubahan kedua UUD 1945 Tahun 2000. Perubahan dan kemajuan signifikan adalah dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah bab tersendiri, yakni Bab XA (Hak Asasi Manusia) dari mulai Pasal 28A sampai 28J. Penegasan Hak Asasi Manusia kelihatan menjadi semakin eksplisit, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28A yang berisi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. (HK118991, t.t.)

Dalam konteks Indonesia, gerakan penghormatan dan penegakan HAM telah muncul ke permukaan dan bergerak secara terbuka sejak runtuhnya rezim Orde Baru. Gagasan untuk gerakan ini muncul. Setelah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM diterima, upaya nasional untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia terus berlanjut di bidang hukum formal. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pada dasarnya, mengubah prinsip-prinsip Piagam HAM yang ditetapkan oleh MPR menjadi hukum. (963-article-3174-1-10-20190119, t.t.) Secara khusus, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah inti dari tanggung jawab negara terhadap HAM. menjaga semua orang dari penyalahgunaan kekuasaan negara, memastikan bahwa hak asasi setiap orang ada dalam hukum dan dalam pelaksanaannya, dan memenuhi hak asasi setiap orang. Untuk melindungi hak untuk tidak disiksa, misalnya, negara harus membuat hukum yang melarang penyiksaan. Negara juga harus memastikan bahwa setiap orang benar-benar bebas dari penyiksaan. Negara juga harus memastikan bahwa hak untuk tidak disiksa secara nyata dipenuhi. (Muhammad, 2018)

Andre Sujatmoko (2015: 59) menyatakan bahwa: Secara Hukum, negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (Protect), menjamin (ensure) dan memenuhi (fulfill) HAM. Mengapa demikian?. Karena, negara

merupakan pihak yang memiliki kekuasaan (Power). Dalam kaitannya dengan HAM negara dituntut untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power). Pengertian negara di sini, mencakup tidak saja pemerintah (eksekutif), tetapi juga legislatif dan yudikatif. Termasuk di dalamnya adalah seluruh aparatur negara/ aparat penegak hukum.

Hak asasi manusia (HAM) adalah prinsip dasar yang dijamin oleh hukum internasional dan harus dijamin oleh setiap negara. Dalam beberapa dekade terakhir, implementasi HAM dalam hukum internasional telah menjadi subjek yang sangat penting dan kompleks. Hukum internasional memuat norma dan prinsip yang bertujuan untuk melindungi martabat dan nilai yang melekat pada semua individu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) adalah landasan dasar hukum HAM internasional yang mencakup berbagai perjanjian, konvensi, dan deklarasi. Hukum HAM internasional menyediakan kerangka kerja universal untuk perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, implementasi HAM dalam hukum internasional telah mengalami tantangan yang signifikan.

## **METODE**

Dalam analisis ini, Penelitian ini akan membahas tentang analisis implementasi HAM dalam hukum internasional dan bagaimana hukum internasional mempengaruhi implementasi HAM. Kita akan memfokuskan pada bagaimana hukum internasional memainkan peran penting dalam mencegah kejahatan terhadap manusia atau hambatan-hambatan yang terkait dengan implementasi HAM dalam hukum internasional dapat diatasi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih dalam mengenai implementasi HAM dalam hukum internasional.

## **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dari penelitian ini:

1. Bagaimana hukum internasional memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap kemanusiaan, serta bagaimana implementasi hukum internasional terkait dengan hak asasi manusia (HAM) dapat meningkatkan efektivitas dalam mengatasi kejahatan ini?
2. Apa hambatan-hambatan yang terkait dengan implementasi HAM dalam hukum internasional, dan bagaimana mereka dapat diatasi untuk meningkatkan keberhasilan implementasi HAM dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap kemanusiaan?

## **Metode**

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang terintegrasi dengan analisis literatur dan praktisi di bidang hukum. Metode ini dipilih karena memungkinkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai kompleksitas implementasi hukum internasional terkait dengan hak asasi manusia (HAM) dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam penelitian ini, analisis literatur akan dilakukan terhadap sumber-sumber yang relevan, termasuk artikel-artikel, buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan hukum internasional dan implementasinya terkait dengan HAM. Analisis ini akan membantu dalam memahami tantangan dan hambatan yang terkait dengan implementasi HAM dalam hukum internasional, serta bagaimana mereka dapat diatasi untuk meningkatkan keberhasilan implementasi HAM dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih dalam mengenai implementasi HAM dalam hukum internasional

dan bagaimana hukum internasional mempengaruhi implementasi HAM dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap kemanusiaan.

## Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa hukum internasional memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap kemanusiaan melalui pengembangan berbagai instrumen hukum yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Namun, implementasi hukum internasional terkait dengan HAM sering kali dihambat oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan kedaulatan negara, ketidakseimbangan kekuatan, dan perbedaan budaya regional. Keterbatasan kedaulatan negara menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum HAM internasional. Meskipun negara-negara telah menandatangani berbagai konvensi dan perjanjian HAM, mereka kadang-kadang enggan atau tidak mampu mengimplementasikan standar-standar HAM tersebut di tingkat nasional. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk keterbatasan sumber daya, kepentingan geopolitik, dan perbedaan budaya regional. Ketidakseimbangan kekuatan juga menjadi hambatan dalam implementasi hukum HAM internasional. Beberapa negara mungkin tidak memiliki mekanisme hukum atau kemauan politik untuk mengadili individu-individu yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain itu, perbedaan budaya regional dapat mempengaruhi implementasi hukum HAM internasional, karena norma, adat istiadat, dan tradisi dalam masyarakat dapat bertentangan dengan standar HAM internasional. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penelitian ini menyarankan beberapa langkah. Pertama, peningkatan kolaborasi internasional diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi hukum HAM internasional. Kedua, alokasi sumber daya yang lebih banyak diperlukan untuk mendukung upaya-upaya implementasi HAM. Ketiga, pengetahuan tentang hukum HAM harus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Keempat, perhatian pada perbedaan budaya regional harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa implementasi HAM internasional dapat disesuaikan dengan konteks lokal.

Dalam sintesis, Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum internasional memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap kemanusiaan, namun implementasinya terkait dengan HAM sering kali dihambat oleh berbagai faktor. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi HAM dalam mencegah dan menangani kejahatan terhadap kemanusiaan, diperlukan upaya bersama yang mencakup peningkatan kolaborasi internasional, alokasi sumber daya yang lebih banyak, pengetahuan tentang hukum HAM, dan perhatian pada perbedaan budaya regional.

A. Prinsip-prinsip hukum internasional yang terkait dengan implementasi hak asasi manusia (HAM) meliputi:

1. Universalitas: Prinsip ini menandakan bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semua individu, tanpa memandang kewarganegaraan atau perbedaan lainnya. Hukum hak asasi manusia internasional berpijak pada prinsip ini, yang berarti bahwa hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya harus dilindungi dan dijamin untuk semua orang, tanpa diskriminasi.
2. Non-Diskriminasi: Prinsip ini menjamin bahwa semua individu harus dilindungi dari diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, status sosial, atau asal usul lainnya. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa semua individu harus dijamin kesetaraan dan perlindungan yang sama, tanpa memandang perbedaan.

3. Ketergantungan: Prinsip ini menandakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dan saling ketergantungan. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak lainnya harus dijamin dan dilindungi secara bersamaan.
  4. Pertanggung jawaban: Prinsip ini menjamin bahwa pihak yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia harus bertanggung jawab. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa pihak yang terlibat dalam pelanggaran harus diadili dan dipidanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
  5. Ganti Rugi: Prinsip ini menjamin bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia harus diberikan ganti rugi. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa korban harus diberikan kompensasi yang adil dan sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami.
  6. Perlindungan: Prinsip ini menjamin bahwa hak asasi manusia harus dilindungi dan dijamin. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak lainnya dari pelanggaran.
  7. Keterbukaan: Prinsip ini menjamin bahwa informasi tentang pelanggaran hak asasi manusia harus diberikan secara terbuka dan transparan. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa informasi tentang pelanggaran harus diberikan kepada masyarakat dan harus dijamin kebebasan berpendapat dan berinformasi.
  8. Kolaborasi Internasional: Prinsip ini menjamin bahwa negara-negara harus bekerja sama untuk melindungi hak asasi manusia. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa negara-negara harus berkoordinasi dan bekerja sama untuk melindungi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak lainnya dari pelanggaran.
  9. Pengawasan: Prinsip ini menjamin bahwa pelanggaran hak asasi manusia harus diawasi dan dihentikan. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah untuk mengawasi dan menghentikan pelanggaran hak asasi manusia.
  10. Pendidikan dan Pengetahuan: Prinsip ini menjamin bahwa pendidikan dan pengetahuan tentang hak asasi manusia harus ditingkatkan. Hukum hak asasi manusia internasional menetapkan bahwa pendidikan dan pengetahuan tentang hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak lainnya harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dilindungi dan dijamin (Lubis dkk., 2023)
- B. Hukum internasional mempengaruhi implementasi hak asasi manusia di negara-negara lain melalui berbagai cara. Berikut adalah beberapa contoh:
1. Pengembangan Standar HAM: Hukum internasional seperti Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966) menetapkan standar hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara-negara. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini diharapkan untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut di tingkat nasional.
  2. Pengawasan Global: Hukum internasional juga mempengaruhi implementasi hak asasi manusia melalui pengawasan global. Organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) memantau dan mengevaluasi implementasi hak

asasi manusia oleh negara-negara. Kritik dan saran yang diberikan oleh organisasi-organisasi ini dapat membantu meningkatkan implementasi hak asasi manusia di negara-negara lain.

3. Kolaborasi Internasional: Hukum internasional mempengaruhi implementasi hak asasi manusia melalui kolaborasi internasional. Negara-negara dapat bekerja sama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar hak asasi manusia yang lebih tinggi. Contohnya, negara-negara dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa internasional yang terkait dengan hak asasi manusia.
4. Pendidikan dan Pengetahuan: Hukum internasional mempengaruhi implementasi hak asasi manusia melalui pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan dan pengetahuan tentang hak asasi manusia dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan kemampuan negara dalam mengimplementasikan hak asasi manusia.
5. Keterbukaan dan Transparansi: Hukum internasional mempengaruhi implementasi hak asasi manusia melalui keterbukaan dan transparansi. Negara-negara yang menandatangani konvensi internasional harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang implementasi hak asasi manusia di negara mereka. Keterbukaan dan transparansi ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kemampuan negara dalam mengimplementasikan hak asasi manusia.

Dalam sintesis, hukum internasional mempengaruhi implementasi hak asasi manusia di negara-negara lain melalui pengembangan standar, pengawasan global, kolaborasi internasional, pendidikan dan pengetahuan, dan keterbukaan dan transparansi. (Tenripadang, t.t.)

- C. Dalam implementasi hukum internasional tentang hak asasi manusia di negara-negara lain, beberapa tantangan yang dihadapi meliputi:
1. Keterbatasan Kedaulatan Negara: Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kedaulatan negara. Meskipun negara-negara telah menandatangani berbagai konvensi dan perjanjian HAM, mereka kadang-kadang enggan atau tidak mampu mengimplementasikan standar-standar HAM tersebut di tingkat nasional.
  2. Ketidakseimbangan Kekuatan: Tantangan lain adalah ketidakseimbangan kekuatan antara negara-negara yang lebih kuat dan yang lebih lemah. Negara-negara yang lebih kuat dapat lebih mudah mengimplementasikan standar HAM, sementara negara-negara yang lebih lemah mungkin tidak memiliki sumber daya atau kemampuan untuk melakukannya.
  3. Perbedaan Budaya Regional: Perbedaan budaya regional juga dapat menjadi tantangan dalam implementasi HAM. Norma, adat istiadat, dan tradisi dalam masyarakat dapat bertentangan dengan standar HAM internasional, sehingga perlu diintegrasikan dengan budaya lokal untuk meningkatkan efektivitas implementasi.
  4. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, seperti dana, personel, dan infrastruktur, dapat menjadi tantangan dalam implementasi HAM. Negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya mungkin tidak dapat mengimplementasikan standar HAM dengan efektif.
  5. Keterbukaan dan Transparansi: Keterbukaan dan transparansi dalam proses implementasi HAM juga penting. Negara-negara harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang implementasi HAM, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memantau proses tersebut.
  6. Pendidikan dan Pengetahuan: Pendidikan dan pengetahuan tentang HAM juga penting dalam implementasi HAM. Masyarakat harus memiliki

pengetahuan yang cukup tentang HAM untuk memahami dan mendukung proses implementasi.

7. Kolaborasi Internasional: Kolaborasi internasional juga penting dalam implementasi HAM. Negara-negara harus bekerja sama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar HAM yang lebih tinggi.
8. Pengawasan Global: Pengawasan global juga penting dalam implementasi HAM. Organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan KHAM memantau dan mengevaluasi implementasi HAM oleh negara-negara, sehingga dapat membantu meningkatkan efektivitas implementasi.

Dalam sintesis, tantangan-tantangan dalam implementasi hukum internasional tentang hak asasi manusia di negara-negara lain meliputi keterbatasan kedaulatan negara, ketidakseimbangan kekuatan, perbedaan budaya regional, keterbatasan sumber daya, keterbukaan dan transparansi, pendidikan dan pengetahuan, kolaborasi internasional, dan pengawasan global.

D. Strategi untuk mencegah hambatan-hambatan yang terkait dengan implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hukum internasional meliputi:

1. Peningkatan Kolaborasi Internasional: Kolaborasi internasional dapat membantu meningkatkan efektivitas implementasi HAM. Negara-negara dapat bekerja sama untuk mengembangkan dan mengimplementasikan standar HAM yang lebih tinggi.
2. Alokasi Sumber Daya yang Lebih Banyak: Alokasi sumber daya yang lebih banyak dapat membantu meningkatkan kemampuan negara dalam mengimplementasikan HAM. Sumber daya yang diperlukan meliputi dana, personel, dan infrastruktur.
3. Pendidikan dan Pengetahuan: Pendidikan dan pengetahuan tentang HAM sangat penting dalam implementasi HAM. Masyarakat harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang HAM untuk memahami dan mendukung proses implementasi.
4. Keterbukaan dan Transparansi: Keterbukaan dan transparansi dalam proses implementasi HAM juga penting. Negara-negara harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang implementasi HAM, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memantau proses tersebut. (Mutawalli, 2023)
5. Pengawasan Global: Pengawasan global juga penting dalam implementasi HAM. Organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan KHAM memantau dan mengevaluasi implementasi HAM oleh negara-negara, sehingga dapat membantu meningkatkan efektivitas implementasi.
6. Perhatian pada Perbedaan Budaya Regional: Perhatian pada perbedaan budaya regional juga penting dalam implementasi HAM. Norma, adat istiadat, dan tradisi dalam masyarakat dapat bertentangan dengan standar HAM internasional, sehingga perlu diintegrasikan dengan budaya lokal untuk meningkatkan efektivitas implementasi.
7. Pengembangan Instrumen Hukum: Pengembangan instrumen hukum yang lebih efektif juga penting dalam implementasi HAM. Instrumen-instrumen seperti Protokol Palermo, tambahan untuk Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, dan Protokol Pemberantasan Perdagangan Orang, yang melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir, diperlukan untuk memerangi perdagangan orang.
8. Pengembangan Kapasitas: Pengembangan kapasitas negara-negara juga penting dalam implementasi HAM. Negara-negara harus memiliki kapasitas yang cukup untuk mengimplementasikan HAM.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terkait dengan implementasi HAM dalam hukum internasional, diperlukan upaya bersama yang mencakup peningkatan kolaborasi internasional, mengalokasikan lebih banyak sumber daya, meningkatkan pengetahuan tentang HAM, dan mempertimbangkan perbedaan budaya regional.

## Kesimpulan

Kajian tersebut mengungkapkan bahwa hukum internasional berperan penting dalam pemajuan dan penegakan hak asasi manusia melalui pengembangan berbagai instrumen hukum berbasis hak asasi manusia. Namun penerapan hukum internasional terkait hak asasi manusia seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kedaulatan negara, lemahnya kekuasaan, dan perbedaan budaya regional. Kedaulatan suatu negara merupakan tantangan utama dalam penerapan hukum hak asasi manusia internasional, karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kedaulatan negara, pertimbangan geopolitik, dan perbedaan budaya regional. Untuk mengatasi masalah ini, studi ini menyoroti beberapa aspek, termasuk kerja sama internasional untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum hak asasi manusia internasional, ketersediaan lebih banyak sumber daya, pendidikan dan pelatihan tentang hukum hak asasi manusia, dan perbedaan budaya regional untuk memastikan bahwa hukum hak asasi manusia internasional dapat ditegakkan. dapat diimplementasikan dengan konteks lokal.

## Daftar Pustaka

- 963-article-3174-1-10-20190119. (t.t.).  
HK118991. (t.t.).
- Lubis, A. F., Hasibuan, K., & Andiani, P. (2023). Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Article Info ABSTRAK. Dalam *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* (Vol. 02, Nomor 10).
- Muhammad, M. (2018). HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM POSITIF DENGAN KONSEP CONSTITUTIONAL IMPORTANCE. Dalam *Meraja Journal* (Vol. 1, Nomor 2).
- Mutawalli, M. (2023). *Arajang : Jurnal Ilmu Sosial Politik Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia*. 6(1), 1–21.  
<https://doi.org/10.31605/arajang.v4i1>
- Tenripadang, A. (t.t.). *HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL*.